

**ANALISIS YURIDIS PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH BUPATI
KABUPATEN MALANG DALAM PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN
PEMBEBASAN JABATAN KEPADA KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
MALANG**

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 11/B/2025/PT.TUN.SBY)



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Diajukan oleh:

AQILLA ILFIA EFFENDI

21071010002

Kepada
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR SURABAYA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH BUPATI KABUPATEN
MALANG DALAM PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN JABATAN
KEPADA KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALANG
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 11/B/2025/PT.TUN.SBY)**

Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,

Pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2025

Penyusun,


Aqila Ilfia Effendi
NPM. 21071010002

Menyetujui,
Dosen Pembimbing,


Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M.
NIP. 19920217 202406 2 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 199001112202012 2 003



HALAMAN REVISI
SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH BUPATI KABUPATEN
MALANG DALAM PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN JABATAN
KEPADA KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALANG
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 11/B/2025/PT.TUN.SBY)

Penyusun,

Aqilla Ilfia Effendi

NPM. 21071010002

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,

pada hari kamis, tanggal 11 September 2025

Pembimbing

Dewan Penguji

Ketua,

Zuhda Mila Fitriana S.H., LL.M.
NIP. 19920217 202406 2 001

1. Maria Novita Apriyani S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029
Anggota I,

2. Miko Aditya Suharto, S.H., M.H.
NIP. 19910721 202406 1 001
Anggota II,

3. Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M.
NIP. 19920217 202406 2 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. NIP.
19900112202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Dra. Ertien Kining Nawangsari M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH BUPATI
KABUPATEN MALANG DALAM PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN
PEMBEBASAN JABATAN KEPADA KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
MALANG

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 11/B/2025/PT.TUN.SBY)

Penyusun,

Aqilla Ilfia Effendi

NPM. 21071010002

Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari Kamis, tanggal 11 September 2025

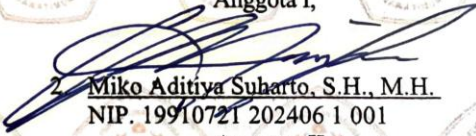
Pembimbing

Dewan Penguji

Ketua,


Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M.
NIP. 19920217 202406 2 001

1. 
Maria Novita Apriyani S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029
Anggota I,

2. 
Miko Aditya Suharto, S.H., M.H.
NIP. 19910721 202406 1 001
Anggota II,

3. 
Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M.
NIP. 19920217 202406 2 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,


Adhitya Widya Kastika, S.H., M.H. NIP.
19900112202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aqilla Ilfia Effendi
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 04 September 2003
NPM : 21071010002
Bidang/Konsentrasi : Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi
Negara
Alamat : Dusun Bendo Desa Mojorejo Kecamatan Modo,
Lamongan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, "**Analisis Yuridis Penyalahgunaan Wewenang Oleh Bupati Kabupaten Malang Dalam Penerbitan Surat Keputusan Pembebasan Jabatan Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, (Studi Kasus Putusan Nomor 11/B/2025/PT.TUN.SBY)**" dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 27 Agustus 2025

Penyusun

Aqilla Ilfia Effendi
NPM. 21071010002

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aqilla Ilfia Effendi
NPM : 21071010002
Program : Sarjana (S1)
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah skripsi ini tidak terdapat bagain dari karya ilmiah lain yang diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapa pun dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Surabaya, 27 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan



Aqilla Ilfia Effendi
NPM. 21071010002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi ini tepat pada waktunya. Adapun judul dari Proposal Skripsi ini adalah **"ANALISIS YURIDIS PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH BUPATI KABUPATEN MALANG DALAM PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN JABATAN KEPADA KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALANG, (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 11/B/2025/PT.TUN.SBY)"**

Tujuan penyusunan Skripsi ini adalah untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Selain itu, penulisan ini juga bertujuan untuk menambah wawasan pembaca dan penulis khususnya terkait bidang Hukum Administrasi Negara. Penyusunan Skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan, arahan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Aldira Mara Ditta C.P, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H, selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;

6. Ibu Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M, selaku Dosen Pembimbing Penulis dalam penulisan Skripsi ini;
7. Para pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah menunjang dalam pengurusan administrasi;
8. Mukhid Effendi dan Artatik Tri Pamungkasih selaku orangtua penulis dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan, doa, kepada penulis;
9. Aqilla Nafisa Effendi dan Ekatama Ajriya Wibowo selaku adik penulis yang selalu ada untuk penulis ketika proses penulisan Skripsi ini;
10. Terimakasih kepada Kwon Ji Yong karena karya-karyanya yang selalu menemani penulis dari SMP sampai pada saat proses penulisan skripsi ini;
11. Teman-teman penulis, Anisa Zahra, Anisa Tri, Fajrin Nouro Fitri, Vannessa, Dear, Muh. Firman. A.S.E, Firza Fikri Rabbani yang selalu memberikan semangat, bantuan kepada penulis dalam proses penyusunan Skripsi ini;

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun Penulis terima dengan lapang dada. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Surabaya, 5 Mei 2025

Penulis

INTI SARI

Penyalahgunaan wewenang merupakan isu penting dalam hukum administrasi negara, yang terjadi ketika pejabat menggunakan kewenangannya tidak sesuai dengan tujuan peraturan perundang-undangan, baik demi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Penelitian ini menganalisis penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Bupati Malang dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang merugikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. KTUN tersebut menyatakan bahwa Kepala Dinas dibebaskan dari jabatannya selama 12 bulan dan dipindahkan menjadi jabatan pelaksana. Keputusan ini kemudian menjadi objek sengketa dalam dua putusan pengadilan dikarenakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke PTUN Surabaya dan Gugatan Banding ke PTTUN Surabaya. Penelitian ini juga menganalisis bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Malang merupakan tindakan sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c UU No. 30 Tahun 2014, yaitu penggunaan kewenangan tanpa alasan objektif dan rasional. Analisis menunjukkan perbedaan penerapan asas umum pemerintahan yang baik dimana pada Putusan No. 98/G/2024/PTUN.SBY menyatakan KTUN yang diterbitkan oleh Bupati adalah sah, sedangkan Putusan Banding No. 11/B/2025/PT.TUN.SBY menekankan keadilan substantif dan dampak sosial bagi masyarakat.

Kata Kunci : Penyalahgunaan Wewenang, AUPB, Pertimbangan Hukum

ABSTRACT

Abuse of authority is an important issue in administrative law, which occurs when officials exercise their powers inconsistently with the purposes of legislation, whether for personal or group interests. This study analyzes the abuse of authority committed by the Regent of Malang in issuing an Administrative Decree (KTUN) that disadvantaged the Head of the Malang Regency Health Office. The decree stated that the Head of the Health Office was released from their position for 12 months and reassigned to a staff position. The decision subsequently became the object of dispute in two court rulings, as the Head of the Health Office pursued legal remedies by filing a lawsuit with the Surabaya Administrative Court (PTUN) and an appeal with the Surabaya Administrative High Court (PTTUN). This study also examines that the abuse of authority committed by the Regent constitutes an arbitrary act as referred to in Article 17 paragraph (2) letter c of Law No. 30 of 2014, namely the exercise of authority without objective and rational grounds. The analysis reveals differences in the application of the general principles of good governance, where Decision No. 98/G/2024/PTUN.SBY declared the decree lawful, while the appellate Decision No. 11/B/2025/PT.TUN.SBY emphasized substantive justice and the social impact on society.

Keywords : Abuse of Authority, General Principles of Good Governance (AUPB), Legal Considerations

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN REVISI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORIGINALITAS	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
INTI SARI	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	11
1.1 Latar Belakang	11
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Keaslian Penelitian.....	7
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.6.1 Jenis dan sifat penelitian	9
1.6.2 Pendekatan	9
1.6.3 Bahan Hukum	9
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	11

1.6.5	Analisis Bahan Hukum	11
1.6.6	Sistematika Penulisan	11
1.7	Kajian Pustaka	13
1.7.1	Tinjauan Umum Penyalahgunaan Wewenang.....	13
1.7.1.1	Pengertian Wewenang	13
1.7.1.2	Pengertian Penyalahgunaan Wewenang.....	14
1.7.1.3	Bentuk Penyalahgunaan Wewenang	16
1.7.1.4	Pengertian AUPB	18
1.7.2	Tinjauan Umum Upaya Hukum Administratif.....	20
1.7.2.1	Pengertian Upaya Hukum	20
1.7.2.2	Pengertian Sanksi.....	23
1.7.2.3	Pengertian Sanksi Administratif.....	25
 BAB II ANALISIS TERHADAP BENTUK PENYALAHGUNAAN		
WEWENANG OLEH BUPATI KABUPATEN MALANG DALAM		
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN JABATAN KEPADA		
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALANG BERDASARKAN		
PUTUSAN	NOMOR	11/B/2025/PT.TUN.SBY.....
		28
2.1	Uraian Penyalahgunaan Wewenang Oleh Bupati Kabupaten Malang Dalam Penerbitan Surat Keputusan Pembebasan Jabatan Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Berdasarkan Putusan Nomor 11/B/2025/PT.TUN.SBY	28

2.2 Analisis Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Oleh Bupati Kabupaten Malang Dalam Penerbitan Surat Keputusan Pembebasan Jabatan Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang berdasarkan Putusan Nomor 11/B/2025/PT.TUN.SBY.	34
BAB III ANALISIS PERBANDINGAN PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN NOMOR 98/G/2024/PTUN.SBY DAN PUTUSAN NOMOR 11/B/2025/PT.TUN.SBY BERDASARKAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK	38
3.1 Analisis Perbandingan Pertimbangan Hukum Terkait Objek Gugatan dan Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Pada Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.SBY dan Putusan Nomor 11/B/2025/PT.TUN.SBY	38
3.2 Analisis Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.SBY dan Putusan Nomor 11/B/2025/PT.TUN.SBY Berdasarkan Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang dalam AUPB.....	44
BAB IV PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan.....	52
4.2 Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Novelty Atau Keaslian Penelitian	8
Tabel 2 : Perbandingan Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.SBY dan Putusan Nomor 11/B/2025/PT.TUN.SBY	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Sertifikat English Proficiency Test (EPT)	65
Lampiran 2 : Surat Penugasan Pembimbing (SKEP).....	66
Lampiran 3 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi	67
Lampiran 4 : Persetujuan Ujian Skripsi Oleh Dosen Pembimbing.....	68
Lampiran 5 : Bukti Kartu Rencana Studi Terbaru.....	69
Lampiran 6 : Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM	70
Lampiran 7 : Kartu Bimbingan	71
Lampiran 8 : Transkrip Nilai.....	72
Lampiran 9 : Penyerahan Laporan Proposal Skripsi.....	73
Lampiran 10 : Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Skripsi	74
Lampiran 11 : Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Jurnal	76
Lampiran 12 : LOA Jurnal	77
Lampiran 13 : Bukti Pembayaran UKT	78
Lampiran 14 : Lembar Revisi	79